

# **Pola Koordinasi Pembangunan Kawasan Strategis Jembatan Suramadu dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan)**

Yusuf Hariyoko

*Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan melihat Keberadaan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan sebagai senjata dalam pengembangan daerah. Keberadaan KSN di Kabupaten Bangkalan tersebut ternyata masih belum mampu mendongkrak kondisi pembangunan sesuai yang diharapkan dan berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat pola koordinasi dalam pengembangan kawasan jembatan suramadu serta pelaksanaan pembangunan berkelanjutannya. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif yang berguna untuk menguraikan masalah secara komprehensif. Hasil dari penelitian adalah 1. Pola koordinasi pengembangan kawasan jembatan suramadu terdiri dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). Sedangkan koordinasi antar aktor masih belum terlaksana dengan baik. 2. Pembangunan berkelanjutan jembatan suramadu pada aspek ekonomi masih belum dirasakan oleh masyarakat, sisi sosial, masih belum menunjukkan dampak yang signifikan, dan sektor lingkungan, masih belum ditunjukkan dengan nyata.

**Kata kunci:** Pembangunan kawasan, koordinasi, pembangunan berkelanjutan

## Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan kewajiban pemerintah sebagai mandat dari rakyat. Pembangunan tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam proses pembangunan, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh pemerintah. Pembangunan atau pengembangan kawasan merupakan salah satu konsep pembangunan yang menekankan pada kawasan tertentu dengan kesamaan tertentu. Anwar (2005), pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Contoh nyata dalam pelaksanaan pembangunan kawasan di Indonesia adalah dengan penetapan Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Konsep lain terkait dengan pembangunan adalah pembangunan berkelanjutan. Sutamihardja (dalam Jaya, 2004) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya mewujudkan: 1) Pemerataan pembangunan antar generasi; 2) Pengamanan terhadap lingkungan hidup; 3) Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam; 4) Mempertahankan kesejahteraan rakyat; dan 5) Mempertahankan manfaat pembangunan. Kedua konsep ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya berhubungan dengan proses pembangunan yang ada di masyarakat. Pembangunan berkelanjutan menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan pembangunan jangka panjang dan pembangunan kawasan berkaitan dengan pembangunan disebuah wilayah.

Salah satu KSN yang menjadi menarik untuk dibahas adalah jembatan suramadu. Pada dasarnya dampak dari pembangunan jembatan suramadu adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pulau Madura dan juga mempermudah akses yang digunakan oleh masyarakat pulau Jawa dan Madura. Jembatan ini bersambung antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Bangkalan. Hal menarik lainnya adalah dampak tersebut masih belum dirasakan oleh masyarakat kabupaten bangkalan yang ada di sekitar kawasan jembatan suramadu. Sejak adanya jembatan beberapa tahun lalu, tidak mampu untuk mendongkrak perekonomian dari masyarakat sekitar. Sehingga perlu adanya solusi terkait dengan masalah tersebut, dan pembangunan yang dilaksanakan di kawasan tersebut mampu berkelanjutan untuk dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Pembangunan yang berkelanjutan dari jembatan suramadu akan mampu untuk menciptakan pembangunan yang dapat dinikmati oleh generasi yang selanjutnya. Sehingga

akan menarik penulis untuk membahas tentang "Pola koordinasi pembangunan kawasan strategis jembatan suramadu dalam konsep pembangunan berkelanjutan".

## **2. Rumusan Masalah**

Pembuatan rumusan masalah bertujuan untuk mencari tahu inti dari permasalahan yang berkaitan dengan tema penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola koordinasi pembangunan di kawasan jembatan suramadu?
2. Bagaimanakah pembangunan berkelanjutan di kawasan jembatan suramadu dengan pola pembangunan yang ada?

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan alasan terkait dengan jawaban rumusan masalah yang berkaitan dengan tema penelitian, sebagai berikut:

1. Mencari tahu, menganalisis, dan mendeskripsikan pola koordinasi pembangunan di kawasan jembatan suramadu
2. Mencari tahu, menganalisis, dan mendeskripsikan pembangunan berkelanjutan di kawasan jembatan suramadu

## **Kajian Pustaka**

### **2. Pembangunan Kawasan**

Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban. Pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah (Hettne, 2000). Hoover dan Giarratani (Nugroho dan Dahuri, 2004), menyimpulkan tiga pilar penting dalam proses pembangunan wilayah, yaitu: 1) Keunggulan komparatif (*imperfect mobility of factor*). Pilar ini berhubungan dengan keadaan ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah; 2) Aglomerasi (*imperfect divisibility*). Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan ekonomi secara spasial; dan 3) Biaya transport (*imperfect mobility of good and service*). Pilar ini adalah yang paling kasat mata mempengaruhi aktivitas perekonomian.

Pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya dan geografis yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan wilayah

yang bersangkutan (Riyadi dalam Ambardi dan Socia, 2002). Anwar (2005), pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Strategi pembangunan yang dilakukan menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (*basic need approach*), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003) prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah: 1) Sebagai *growth center*; 2) Pengembangan wilayah memerlukan kerjasama pengembangan antar daerah; 3) Bersifat integral; dan 4) Menjadikan mekanisme pasar sebagai prasyarat. Aspek yang paling penting dan yang menjadi topik pengembangan kawasan adalah dampak keberlanjutannya dalam kehidupan masyarakat, dari aspek ekonomi, manusia, sosial, dan lingkungan.

## 2. Pembangunan Berkelanjutan

Kebutuhan akan pembangunan yang lebih ramah lingkungan sangat menjadi perhatian bagi mayoritas pemerintah untuk saat ini. Konsep tersebut saat ini dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan ini mengolaborasikan pembangunan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga dapat bermanfaat pada semua generasi. Sutamihardja (dalam Jaya, 2004) menjelaskan bahwa sasaran dari pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya: 1) Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration-equity*); 2) Pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3) Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam; 4) Mempertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter-temporal*); dan 5) Mempertahankan manfaat pembangunan.

Menurut Said (2012) Dalam 3 aspek pembangunan tersebut memiliki isu strategis sendiri ditiap aspeknya, diantaranya: 1) Aspek sosial: Ketimpangan kesejahteraan sosial, Akses tidak merata terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan Tingkat pelanggaran hukum masih tinggi (pidana dan perdata); 2) Aspek ekonomi: Masih terjadi ketimpangan/ disparitas pembangunan ekonomi (wilayah hilir dan hulu); Pembangunan sektor sekunder (manufaktur/ industri) dan sektor tersier (jasa) semakin mendominasi; dan Pembangunan Infrastruktur terkonsentrasi di wilayah perkotaan (hilir); 3) Aspek lingkungan: Sumberdaya Air menjadi sangat sensitif ketersediaannya dibandingkan kebutuhan yang meningkat pesat

(di sektor industri dan pemukiman baru di wilayah perkotaan); Pencemaran air dan udara berpotensi menjadi semakin tinggi, khususnya di wilayah perkotaan; dan Sumberdaya alam lainnya belum tergalai optimal

Serupa dengan konsep pembangunan berkelanjutan, *Triple bottom line* yang dikemukakan oleh Elkington (1997) terkait dengan pembangunan yang tidak boleh mengejar pertumbuhan ekonomi (*Profit*) semata, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan keadilan masyarakat (*People*), dan juga kelestarian lingkungan (*Planet*) atau yang lebih dikenal dengan istilah 3P (*Profit, People, and Planet*) (pustakabakul.blogspot.com). Penjelasan dari aspek dalam *Triple Bottom Line* dalam kegiatan pembangunan adalah sebagai berikut: 1) Ekonomi (*Profit*): sesuai dengan tujuan pembangunan klasik yang seyogyanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 2) Masyarakat (*People*): pembangunan harus mampu melibatkan masyarakat sebagai subyek kegiatan; dan 3) Lingkungan (*Planet*): Proses pembangunan yang dilakukan tidak boleh melupakan aspek lingkungan ini, karena pada proses pembangunan sebelumnya aspek ini kurang mendapat perhatian.

### **3. Kerjasama antar Daerah**

Sementara itu dalam khazanah akademik, Flo Frank and Anne Smith (2000:5) menyatakan bahwa kerjasama dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan dua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan bersama, yang berjanji untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Kerjasama adalah tentang orang-orang yang bekerjasama bersama-sama dalam suatu hubungan yang menguntungkan, selalu mengerjakan sesuatu hal bersama-sama yang mungkin tidak dapat dicapai sendirian (dalam LAN, 2004). Kerjasama antar daerah secara umum terjadi karena adanya saling ketergantungan dalam aktivitas ekonomi; perbedaan dalam kepemilikan sumber daya; kebutuhan spesialisasi dengan maksud meningkatkan nilai tambah suatu daerah; serta karena kondisi geografis dan karakteristik yang berbeda.

Dilihat dari pendekatan teoretis, adanya kerjasama antar daerah memang dipercaya dapat menghasilkan berbagai dampak yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Dalam hubungan ini, *Municipal Cooperation Guide* (dalam LAN: 2004) menyebutkan bahwa keuntungan yang dapat diraih dari adanya kerjasama antar daerah antara lain adalah: Meningkatkan efisiensi unit-unit operasional, pemerintah daerah dapat memperoleh pelayanan atau produk yang tidak dapat dihasilkan sendiri, menghapuskan duplikasi usaha, mengubah struktur dasar dari sistem pemerintah daerah, memberi kontribusi pada peluang pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Meskipun kerjasama regional ini menjanjikan banyak sisi positif, namun ada juga kemungkinan menimbulkan hal yang sebaliknya. Dampak negatif dapat muncul jika terpenuhi kondisi-kondisi antara lain: tidak jelasnya naskah dan konsep perjanjian kerjasama, tidak

sejajarnya kedudukan antar pihak yang melakukan kerjasama, kurang adanya perencanaan yang matang dan pengendalian yang ketat, dan sebagainya. Alasan penting pelaksanaan kerja sama antar pemerintah daerah adalah sebagai berikut: membentuk kekuatan yang lebih besar; mencapai kemajuan yang lebih tinggi; dapat memperkecil atau mencegah konflik; memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan; dan kerjasama ini dapat menghilangkan ego daerah.

Agar berhasil melaksanakan kerjasama tersebut dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana terdapat dalam prinsip "*good governance*" (lihat Edralin, 1997). Beberapa prinsip diantara prinsip *good governance* yang ada dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antar Pemda yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Efisiensi, Efektivitas, dan Konsensus. Secara teoretis dan pengalaman empiris, badan-badan kerjasama dapat dikategorikan kedalam beberapa model (PKP2A III LAN, 2002). Beberapa model yang umum dipergunakan adalah sebagai berikut: 1) Kerjasama Usaha Dengan Membentuk Lembaga Baru yang Permanen; 2) Kerjasama Usaha Tanpa Membentuk Badan / Lembaga Baru; 3) Kerjasama Pelayanan Dengan Membentuk Lembaga Baru yang Permanen; 4) Kerjasama Pelayanan Tanpa Membentuk Lembaga Baru; 5) Kerjasama Bantuan Teknis (*technical assistance*) berupa Pemberian bantuan teknis, Pemagangan, dan Pertukaran pegawai.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan yang menjadikan peneliti untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang masalah yang ingin diteliti secara sistematis, faktual, akurat, dan hubungan yang timbul antara gejala dengan gejala di masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti hendak mengumpulkan informasi dan mendeskripsikan tentang Pola koordinasi pembangunan kawasan jembatan suramadu dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

### **2. Fokus penelitian**

Penentuan fokus penelitian adalah untuk membatasi masalah yang ingin diteliti. Fokus ditentukan sesuai dengan susunan dari rumusan masalah. Maka disusun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pola koordinasi pembangunan kawasan jembatan suramadu
  - a. Aktor yang terlibat dan kewenangannya
  - b. Koordinasi antar aktor

2. Pembangunan kawasan jembatan suramadu
  - a. pembangunan ekonomi
  - b. pembangunan sosial
  - c. pembangunan lingkungan

### **3. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini peneliti akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah serta fokus penelitian yang telah ditentukan dan penyesuaiannya dengan yang ada di lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di kabupaten Bangkalan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu sisi dari jembatan suramadu, di seberang surabaya. Pada awalnya Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur, namun dengan adanya jembatan suramadu sejak tahun 2009, harusnya sudah ada dampak yang signifikan dalam proses pembangunannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah letak atau tempat dimana peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun situs dari penelitian yang diteliti adalah

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan,
2. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
3. Masyarakat sekitar jembatan suramadu di sisi Kabupaten Bangkalan

Pemilihan situs penelitian tersebut mempertimbangkan obyektifitas data yang akan diambil peneliti dari sudut pandang pemerintah selaku pembuat kebijakan dan para sasaran dari kebijakan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pola Koordinasi Pembangunan Kawasan Jembatan Suramadu**

#### **a. Aktor yang Terlibat dan Kewenangannya**

Pada dasarnya, kawasan jembatan suramadu merupakan tanggungjawab banyak pihak dalam pengembangannya. Pihak yang jelas berkepentingan paling tidak adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Surabaya, dan Provinsi Jawa Timur selaku pemilik wilayah. Namun, dengan tujuan meningkatkan efektifitas pengelolannya, pemerintah pusat membuat badan yang khusus menangani pengembangan kawasan jembatan suramadu (BPWS). BPWS memegang peran sesuai dengan nomenklaturnya, yaitu badan atau lembaga yang tidak

melaksanakan kegiatan teknis dan layanan. Pada dasarnya dengan banyaknya aktor yang berkepentingan dalam pengembangan suramadu mampu untuk meningkatkan potensi pembangunan daerah. Namun, pada kenyataannya yang terjadi adalah pembangunan perekonomian cukup berkembang di Kota Surabaya, sedangkan pada sisi lain yang ada di Kabupaten Bangkalan masih belum menunjukkan perubahan signifikan. Informasi terkait stagnansinya proses pembangunan di sisi bangkalan dapat dilihat dengan jelas pada kondisi awal adanya jembatan sampai saat ini (10 tahun).

Permasalahan yang muncul semakin kompleks, yaitu aktor-aktor yang berkepentingan tersebut malah belum mampu untuk menciptakan kondisi sesuai yang diharapkan. Minimnya koordinasi atau lemahnya pola koordinasi dianggap sebagai permasalahan yang masih belum terpecahkan. Hal ini ditunjukkan dengan pola kegiatan antar aktor seringkali sama dan dengan sasaran yang sama pula. Pemerintah pusat yang diwakili oleh BPWS harusnya mampu untuk meningkatkan koordinasi terkait dengan pengembangan pembangunan kawasan suramadu. Koordinasi tersebut dapat dilaksanakan mulai pada tahapan perencanaan program, sehingga tidak ada program pengembangan kawasan tersebut dengan pola dan sasaran yang sama. Sehingga pada akhirnya kawasan jembatan suramadu mampu meningkatkan keunggulan komparatif khususnya pada Kabupaten Bangkalan dan aglomerasi bagi Jawa timur sesuai yang dinyatakan Hoover dan Giarratani (Nugroho dan Dahuri, 2004) karena semakin efektif dan efisiennya kegiatan logistik.

## **b. Koordinasi antar Aktor**

Aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan kawasan jembatan suramadu, sudah ditetapkan masing-masing peran dan kewenangannya. Koordinasi yang dilakukan oleh BPWS seringkali hanya dilaksanakan saat akan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kawasan jembatan suramadu. Hal ini dinilai masih belum optimal, karena sesuai dengan prinsip "*good governance*" (Edralin, 1997) Efisiensi, Efektivitas, dan Konsensus tidak akan tercapai apabila proses tidak dimulai oleh masing-masing aktor dalam perencanaan program dan kegiatannya. Dalam aspek efektifitas tidak akan tercapai apabila masing-masing menggunakan program pribadi yang dibuat. Efisiensi juga tidak akan berjalan, karena bisa saja beberapa aktor akan melaksanakan kegiatan yang sama dan dengan sasaran yang sama pula. Sedangkan dalam konsesus sudah pasti tidak akan terlaksana, karena tidak ada kesepakatan antar pihak dalam pembuatan program, dan bahkan dalam pelaksanaannya.

Pilihan realistis adalah dengan mengaji ulang kepentingan, kewenangan, dan juga peluang yang akan digunakan dalam pengembangan kawasan jembatan suramadu yang pada akhirnya akan membuat sebuah model kerjasama konkrit dalam model kerjasama seperti yang dikemukakan dalam PKP2A III LAN (2002). Alternatif yang ditawarkan berupa 1)



Kerjasama Usaha Dengan Membentuk Lembaga Baru yang Permanen; 2) Kerjasama Usaha Tanpa Membentuk Badan / Lembaga Baru; 3) Kerjasama Pelayanan Dengan Membentuk Lembaga Baru yang Permanen; 4) Kerjasama Pelayanan Tanpa Membentuk Lembaga Baru; 5) Kerjasama Bantuan Teknis (*technical assistance*) berupa Pemberian bantuan teknis, Pemagangan, dan Pertukaran pegawai. Hasil dari kajian diharapkan mampu untuk memberikan jalan keluar dalam pelaksanaan pengembangan kawasan jembatan suramadu berkelanjutan yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya.

## **2. Pembangunan Kawasan Jembatan Suramadu**

### **a. Pembangunan Ekonomi**

Stagnansi perekonomian warga sekitaran jembatan suramadu yang ada di Kabupaten Bangkalan menjadi menarik untuk ditinjau, karena operasional yang sudah lama terlaksana masih belum memberikan dampak pada masyarakat. Pembangunan yang memang sudah ada, masih belum memberikan dampak sesuai yang diharapkan. Perkembangan perekonomian masih terbatas pada sejumlah penduduk yang menggunakan kawasan pinggiran jalan saja. Prinsip pengembangan wilayah sebagai *growth center* dari Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003), masih belum terlaksana. Hal ini dikarenakan pembangunan masih belum integral antar sektor. Permasalahan terkait dengan pembangunan aspek ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan pula menurut Said (2012) masih belum terjadi, karena dalam kawasan tersebut masih ada ketimpangan walaupun sudah ada pembangunan Infrastruktur. Padahal dengan adanya jembatan tersebut akan mampu untuk menjaga aglomerasi dan mengurangi biaya transport (Hoover dan Giarratani dalam Nugroho dan Dahuri, 2004),

Pemerintah dengan demikian perlu untuk mengaji ulang kebijakan yang sudah ada. Perlu ada kebijakan khusus untuk meningkatkan proses tersebut. Misalkan saja dapat dilakukan dengan pembuatan kebijakan yang mampu untuk menarik investor, karena sepanjang jalan suramadu tersebut masih belum ada industri atau kegiatan ekonomi lain yang lebih mampu untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dari masyarakat sekitar. Kebijakan lain yang dapat dilaksanakan adalah dengan menjalin kerjasama dengan Kota Surabaya atau Provinsi Jawa Timur untuk membentuk kekuatan yang lebih besar pada penanganan bidang tertentu.

### **b. Pembangunan Sosial**

Permasalahan sosial yang ada di kawasan tersebut adalah masih banyaknya warga yang masih belum bekerja. Padahal yang menjadi catatan adalah dengan keberadaan jembatan suramadu yang sudah sekian tahun masih belum memberikan dampak terkait sosial. Said (2012) yang sudah menyatakan bahwa ada ketimpangan kesejahteraan sosial, dan Tingkat

pelanggaran hukum masih tinggi akan menurun dengan adanya pekerjaan yang layak bagi masyarakat sekitar.

Terkait dengan masalah tersebut, harusnya pemerintah mampu untuk memberikan pemecahan masalah dengan membuat badan usaha baru. Badan usaha tersebut dapat dilaksanakan berupa BUMD atau juga BUMDes. Selain itu, juga dapat dilaksanakan pelatihan yang mampu untuk menunjang keberadaan dari jembatan suramadu.

### **c. Pembangunan Lingkungan**

Aspek lingkungan yang merupakan salah satu bagian dalam pembangunan berkelanjutan masih belum terlaksana secara sistematis. Pada dasarnya pihak-pihak yang terlibat kerjasama dalam pengembangan kawasan suramadu masih belum memiliki kajian lingkungan pelaksanaan. Kajian lingkungan yang ada diperkirakan dimiliki oleh kementerian saat proses pembangunan jembatan suramadu.

Teori *triple bottom line* yang dikemukakan oleh Elkington (1997) sudah jelas, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus ada dampak pada aspek lingkungan pula. Pelaksanaan pembangunan aspek lingkungan ini dapat terlaksana dengan adanya kajian resmi yang mendalam terkait dengan dampak keberadaan jembatan suramadu, yang khususnya di Kabupaten Bangkalan. Kajian tersebut harus dibuat sesuai dengan peraturan yang ada, berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang kemudian setelah ada, juga perlu dilaksanakan evaluasi pada dampak yang diinginkan.

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengacu pada temuan yang ada di lapangandanmenjadihal yang penting untuk dibahas sesuai dengan rumusan masalah. Kesimpulan yang diambil sebagai berikut:

1. Pola koordinasi pembangunan kawasan jembatan suramadu
  - a. Aktor yang terlibat terdiri dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui instansi-instansinya, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah pusat melalui Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).
  - b. Koordinasi antar aktor masih belum terlaksana dengan baik, misalkan saja pemerintah Kabupaten Bangkalan masih ada tumpang tindih kegiatan dengan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).
2. Pembangunan kawasan jembatan suramadu

- a. Pembangunan ekonomi, masih belum dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri saat sebuah kawasan yang memiliki situs strategis nasional masih belum mampu memberikan efek yang signifikan setelah ada 10 tahun.
- b. Pembangunan sosial, masih belum menunjukkan dampak yang signifikan dengan masih banyaknya masyarakat sekitar yang belum mendapat pekerjaan.
- c. Pembangunan lingkungan, masih belum ditunjukkan dengan adanya kajian-kajian yang dilakukan oleh pemerintah.

## **2. Rekomendasi**

Rekomendasi merupakan masukan yang diberikan sesuai dengan kesimpulan yang diambil. Rekomendasi sendiri tidak boleh lepas kaitannya dengan rumusan masalah dan kesimpulan. Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pola koordinasi pembangunan kawasan jembatan suramadu
  - a. Masyarakat harusnya lebih dilibatkan dalam setiap kegiatan pembangunan di kawasan jembatan suramadu tersebut.
  - b. Perlu adanya perbaikan pada sistem koordinasi antar aktor, dapat dilakukan dengan pertemuan rutin yang membahas tentang kegiatan masing-masing aktor dalam pembangunan kawasan jembatan suramadu.
2. Pembangunan kawasan jembatan suramadu
  - a. Pembangunan ekonomi, dapat mempertimbangkan pola baru dengan meningkatkan kerjasama dengan swasta melalui pola investasi yang akan menguntungkan pemerintah dan juga masyarakat.
  - b. Pembangunan sosial, dapat dilakukan dengan membentuk lembaga yang mengakomodir kepentingan masyarakat, seperti BUMD atau BUMDes yang mampu menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar.
  - c. Pembangunan lingkungan, perlu adanya KLHS dan AMDAL sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak negatif dalam pembangunan yang dilakukan.

## **Daftar Pustaka**

- Ambardi, Urbanus dan Prihawantoro, Socia. 2002. *Pengembangan wilayah dan otonomi daerah*, Jakarta. Penerbit Pusat Kebijakan Teknologi dan Pengembangan Wilayah.
- Anwar, A. 2005. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan: Tinjauan Kritis*. Bogor: P4W Press.

- Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 2002. *Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional Dan Daerah (Agropolitan)*. Jakarta: Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
- Frank, Flo and Anne Smith. 2000. *The Partnership Handbook*. Canada: Ministry of Public and Government Services.
- Hettne B. 2000. *Reorientasi Teori Pembangunan. dalam Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*. Edisi 5. Tahun II. hal. 73-100. Yogyakarta: Insist Press.
- Jaya, Askar. 2004. *Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development)*. IPB Bogor
- NN. *Triple bottom line*. Diakses tanggal 13 November 2013 dari [pustakabakul.blogspot.com/2013/04/teori-triple-bottom-line.html](http://pustakabakul.blogspot.com/2013/04/teori-triple-bottom-line.html)
- Nugroho, I. dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- PKP2A I LAN. 2002. *Hubungan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah*. Bandung: Laporan Hasil Penelitian.
- Said, Abdullah. 2012. *Materi Pelatihan Penyusunan RPJMD*. Malang: RCCP FIA UB
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang